

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) telah diindikasikan sebagai bentuk dari tindakan dan kebijakan yang disengaja dengan tujuan penipuan atau memanipulasi sehingga merugikan pihak lain. Di Indonesia kecurangan akuntansi ini sangat erat kaitannya dengan korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Gusmaini dkk, 2014). Widjaja (1992) dalam Fadli (2014) menyatakan alasan yang melatar belakangi kecurangan adalah manajer tidak mengindahkan moral (*unscrupulous*) mungkin membantu kepentingan yang bertentangan. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik manusia yang paling mungkin melakukan kecurangan, pemerintahan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi antara lain : keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu.

Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang

berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi fraud di sektor pemerintahan (Zulkarnain, 2013).

Kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu perlunya adanya keefektifan pengendalian internal yang baik agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan tersebut. Pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan (Fadli, 2014). Semakin baik pengendalian internal suatu pemerintahan maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi.

Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan lebih daripada yang lainnya terhadap sesuatu hal disebut *Information Asimetry* (Utomo, 2006 dalam Zainal (2013). Apabila terjadi asimetri informasi maka manajemen akan menyajikan laporan keuangan yang bias dan bermanfaat bagi mereka seperti untuk mempertahankan jabatan, memperoleh kompensasi yang tinggi atau hanya sekedar untuk mendapatkan apresiasi dari atasan atas kinerjanya. Asimetri informasi ini timbul karena *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* dan *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai

perusahaan secara keseluruhan. Asimetri informasi yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent* (Zainal, 2013).

Kesesuaian kompensasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Kompensasi acapkali juga disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Tindakan kecurangan terjadi karena adanya sifat individual yang ingin memaksimalkan keuntungan, dan juga karna tingginya kebutuhan pribadi, dan merasa imbalan yang didapatkan dalam bekerja tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Maka dari itu dengan adanya kesesuaian kompensasi kebutuhan individu dapat terpenuhi sehingga tindakan-tindakan kecurangan tersebut dapat dihindarkan (Fadli, 2014).

Tindakan tidak etis dan tindakan curang dapat dipengaruhi oleh adanya sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan. Pengendalian internal memegang peranan penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Pengendalian internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya perilaku yang tidak etis serta kecenderungan untuk berlaku curang serta budaya etis manajemen juga akan meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran anggota organisasi terhadap hadirnya pengawasan yang integral dan bersinambungan. Sehingga masing-masing pihak akan dengan senang hati

menjalankan system pengendalian dan tunduk pada aturan yang ada di dalam sistem (Artini dkk, 2014).

Moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Magnis (2001) mengatakan bahwa sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas. Ia mengatakan moralitas sebagai sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Hanya moralitaslah yang bernilai secara moral.

Penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena berkaitan dengan kecurangan akuntansi. Menurut hasil penelitian Indonesia Corruption Watch tren korupsi tahun 2014 cenderung meningkat dengan taksiran kerugian Negara mencapai Rp. 3.700.000.000.000. Selain itu, meski jumlah tersangka menurun, jumlah kasus korupsi meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013. Kenaikan kasus korupsi yang signifikan sering terjadi di daerah. Jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi meningkat lebih dari dua kali lipat. Pada semester I tahun 2013 tercatat 11 kepala daerah menjadi tersangka, sedangkan semester I tahun 2014 hingga Juni sudah 25 orang menjadi tersangka. Dari 308 kasus yang ditemukan sebanyak 51 korupsi dilakukan dengan modus penggelapan di wilayah kabupaten, 19 kasus dengan modus penyalahgunaan anggaran di wilayah kota, 4 kasus dari laporan fiktif di wilayah provinsi dan 4 kasus penyalahgunaan anggaran di wilayah pusat. Sebagian besar korupsi semester I tahun 2014 dilakukan pejabat daerah, tetapi korupsi yang menyebabkan kerugian

negara relatif besar terjadi di pusat. Dari 308 kasus korupsi yang ditangani penegak hokum saat ini, terdapat 97 kasus diantaranya diduga dilakukan pemerintahan daerah, disusul dewan perwakilan rakyat daerah ada 21 kasus, kementerian dan dinas 19 kasus.

Fenomena korupsi di Jawa Tengah yaitu adanya korupsi padat karya di daerah itu. Mereka menahan mantan pelaksana tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Cilacap yang diduga menyelewengkan uang rakyat senilai Rp 499 juta dengan nilai total kegiatan tersebut mencapai Rp 4,4 miliar. Modus yang digunakan yaitu membayarkan seluruh bayaran tenaga kerja kepada desa namun kemudian meminta desa untuk meyetorkan kembali sebagian uang kepadanya. Selain itu, juga diduga tidak membayar honor tenaga kerja padat karya ([www.infokorupsi.com](http://www.infokorupsi.com)).

Selain fenomena tersebut, terdapat fenomena *research gap* atau hasil temuan yang berbeda-beda sebagai berikut. Mustikasari (2013); Najaningrum (2013); Putri (2014); Chandra dan Ikhsan (2015); Zulkarnain (1013) menemukan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan penelitian Pramudita (2013); Gusmaini dkk (2014) menemukan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian yang dilakukan Mustikasari (2013); Najaningrum (2013); Chandra dan Ikhsan (2015); Ariani, dkk (2014) menemukan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi,

sedangkan Gusmaini dkk (2014) menemukan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian Mustikasari (2013); Najaningrum (2013); Putri (2014); Chandra dan Ikhsan (2015); dan Zulkarnain (1013) menemukan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan hasil penelitian Fadhli dkk (2014) menemukan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, namun hasil penelitian Gusmaini dkk (2014) menemukan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian Ariani, dkk (2014) menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan temuan Fadhli dkk (2014) menunjukkan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini mengacu pada riset yang dilakukan oleh Mustikasari (2013), dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menghilangkan variabel bebas : penegakan hukum, keadilan procedural, budaya etis manajemen dan komitmen organisasi. Perbedaan lainnya yaitu adanya penambahan variabel bebas yaitu moralitas individu. Alasan menghilangkan variabel bebas tersebut disebabkan karena tidak ditemukannya fenomena *research gap* pada riset terdahulu pada keempat variable bebas tersebut. Sedangkan alasan penambahan variable moralitas individu karena adanya *research gap* pada keterkaitan pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan

akuntansi. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2013) terletak pada penentuan obyek penelitiannya.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Tenaga Kerja Di Jawa Tengah”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut terdapat kecurangan akuntansi ini sangat erat kaitannya dengan korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. alasan yang melatar belakangi kecurangan adalah manajer tidak mengindahkan moral (*unscrupulous*) mungkin membantu kepentingan yang bertentangan. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik manusia yang paling mungkin melakukan kecurangan, pemerintahan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi. beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi antara lain : keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja yang ada di Jawa Tengah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Dinas Tenaga Kerja Di Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Dinas Tenaga Kerja Di Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Dinas Tenaga Kerja Di Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Dinas Tenaga Kerja Di Jawa Tengah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Dinas Tenaga Kerja Di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Dinas Tenaga Kerja Di Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Dinas Tenaga Kerja Di Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Dinas Tenaga Kerja Di Jawa Tengah.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman peneliti terhadap teori terutama yang berkaitan dengan akuntansi keperilakuan, serta dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan yang berdasarkan dengan fakta khususnya terkait dengan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Tenaga Kerja Di Jawa Tengah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada instansi pemerintah tentang faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Tenaga Kerja Di Jawa Tengah.

